



Analisis Peran Demokrasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Literatur dan Dokumen Kebijakan

Dina Afriati^{1*}, Rizky Huda Permana², Anas Malik³

1,2,3 Universitas Islam Negeri Raden Intan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i1.5094>

*Correspondence: Dina Afriati

Email: dinafriati@gmail.com

Received: 02-09-2025

Accepted: 15-10-2025

Published: 23-11-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyze the relationship between democracy and economic growth in Indonesia and assess the extent to which democratic values are implemented in national economic policy. The method used is descriptive qualitative research with a systematic literature review approach and analysis of public policy documents published between 2015 and 2024. The results of the study show that democracy contributes positively to economic growth through open governance, strong law enforcement, and community participation in productive sectors such as MSMEs. The implementation of democracy in several regions, such as North Sumatra, Aceh, and Riau, has been proven to accelerate local economic development and improve community welfare. However, various challenges such as corruption, bureaucratic inefficiency, and low public participation still limit the effectiveness of democracy in promoting optimal economic growth. The research conclusion emphasizes that quality democracy not only strengthens political legitimacy but also serves as an important foundation for inclusive and sustainable economic growth. The implications of this research underscore the need to strengthen democratic institutions and improve public governance capacity to support economic policies that are more transparent, participatory, and community-oriented.*

Keywords: *Democracy; Economic Growth; Governance; Public Participation; Economic Policy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta menilai sejauh mana nilai-nilai demokrasi diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan systematic literature review dan analisis dokumen kebijakan publik yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola pemerintahan yang terbuka, penegakan hukum yang kuat, dan partisipasi masyarakat dalam sektor produktif seperti UMKM. Implementasi demokrasi di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, terbukti mempercepat pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai tantangan seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, dan rendahnya partisipasi publik masih membatasi efektivitas demokrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas bukan hanya memperkuat legitimasi politik, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan institusi demokratis serta peningkatan kapasitas tata kelola publik untuk mendukung kebijakan ekonomi yang lebih transparan, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat.

Kata Kunci: Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Tata kelola pemerintahan, Partisipasi Publik, Kebijakan Ekonomi.

Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan dengan menjamin partisipasi publik, kebebasan sipil, serta mekanisme akuntabilitas yang menjadi dasar terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan

efektif (Sudrajat, 2016). Dalam konteks pembangunan ekonomi, demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai tatanan politik, tetapi juga instrumen strategis yang dapat memperkuat stabilitas sosial dan mendorong kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Negara dengan sistem demokratis cenderung memiliki iklim investasi yang stabil, peningkatan produktivitas, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien (Marijan, 2019). Sejak era reformasi, Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dalam memperkuat sistem demokrasi yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui partisipasi masyarakat dan desentralisasi fiskal (Iskandar & Subekan A., 2020). Namun, realitas menunjukkan bahwa pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu linier, karena efektivitasnya bergantung pada kualitas institusi, tata kelola kebijakan, serta kemampuan birokrasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat (Putri & Triani, 2021). Dalam konteks Indonesia, penerapan demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan sebagaimana tercermin dalam gagasan Demokrasi Ekonomi Pancasila. (Simanjuntak et al., 2021) menegaskan bahwa demokrasi ekonomi berperan penting dalam memperkuat kemandirian nasional di tengah arus globalisasi dan revolusi industri 4.0 melalui penguatan sektor produksi rakyat, partisipasi publik, serta pemerataan kesejahteraan. Perspektif ini memperkaya pemahaman bahwa demokrasi Indonesia memiliki karakteristik khas yang menekankan keberlanjutan, kemandirian, dan pemerataan hasil pembangunan.

Berbagai penelitian selama satu dekade terakhir menunjukkan temuan yang beragam mengenai hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Temuan internasional seperti (Jane & Ojaghlou, 2025) menunjukkan bahwa demokrasi berkualitas mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas kelembagaan dan kebijakan fiskal yang transparan. Hal serupa ditunjukkan oleh (Densumite, 2022) yang menemukan hubungan positif antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara Asia. Di sisi lain, (Mose, 2025) menegaskan bahwa korupsi dapat melemahkan manfaat demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, (Wibowo, 2020) menunjukkan bahwa variasi aspek demokrasi nasional berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB, sementara (Syawie, 2011) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan. Beberapa studi menegaskan bahwa demokrasi yang stabil dapat memperkuat legitimasi kebijakan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan (Aloui & Saghrouni, 2024; Moatabar, 2021; Yangailo, 2024). Di sisi lain, penelitian lain menemukan adanya potensi trade-off jangka pendek antara tuntutan politik populis dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada stabilitas fiskal (Widuri, 2021). Di tingkat daerah, praktik demokrasi lokal yang kuat terbukti mampu meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi, seperti di Sumatera Utara dan Aceh yang mengalami pertumbuhan inklusif melalui kebijakan transparan dan pro-rakyat (Ansori et al., 2015; Damanik & Lubis, 2022). (Mryn & Furqon I., 2024) juga menegaskan bahwa demokrasi yang matang mampu menumbuhkan kepercayaan investor melalui penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan hak properti. Namun demikian, kendala seperti rendahnya partisipasi publik, lemahnya kapasitas birokrasi, serta praktik

korupsi masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan ekonomi.

Tinjauan terhadap literatur mutakhir juga memperlihatkan bahwa sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada analisis kuantitatif lintas-negara, sementara studi longitudinal dan kualitatif komparatif di tingkat nasional masih jarang dilakukan. Penelitian (Purba & Hariyadi, 2023) menunjukkan bahwa relasi demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola dan kualitas partisipasi publik di tingkat daerah. Lebih jauh, (Kurniawan, 2022) menegaskan bahwa faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan masyarakat dan ketimpangan dapat memengaruhi kualitas demokrasi, sehingga hubungan keduanya bersifat dua arah. Temuan Utomo dan Soetjipto juga memperlihatkan bahwa demokrasi daerah mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan lokal. (Moatabar, 2021) menggarisbawahi perlunya pendekatan konseptual yang mampu menjelaskan variasi hasil penelitian akibat perbedaan konteks sosial politik antar negara. Di Indonesia, keterbatasan studi mengenai dampak demokrasi terhadap transformasi ekonomi daerah menyebabkan pemahaman tentang efek jangka panjang demokrasi terhadap pertumbuhan belum komprehensif. Selain itu, integrasi antara analisis literatur akademik dan dokumen kebijakan publik masih minim, sehingga sulit menilai sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar merefleksikan prinsip demokrasi ekonomi (Masâ, R. et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya research gap penting yang perlu dijawab melalui pendekatan penelitian kualitatif dan analisis dokumen kebijakan yang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan kajian terdahulu dengan menelaah secara sistematis peran demokrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur dan analisis dokumen kebijakan untuk memahami mekanisme demokrasi dalam mempengaruhi kebijakan publik, tata kelola ekonomi, serta penguatan sektor UMKM sebagai indikator pertumbuhan inklusif (Agustin et al., 2023). Secara khusus, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi hubungan empiris antara kualitas demokrasi dan pertumbuhan ekonomi; (2) menganalisis faktor kelembagaan dan kebijakan publik yang memperkuat hubungan tersebut; dan (3) memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan nilai-nilai demokrasi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur politik ekonomi serta kontribusi praktis bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola demokratis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sifat studi literatur sistematis yang dikombinasikan dengan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang bersifat kompleks, kontekstual, serta melibatkan banyak variabel sosial dan politik. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada upaya memahami hubungan konseptual dan empiris antara nilai-nilai

demokrasi seperti akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum dengan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional. Metode deskriptif memberikan keleluasaan untuk menggambarkan fenomena sosial secara utuh serta menafsirkan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Yangailo, 2024). Selain itu, analisis dokumen kebijakan dilakukan untuk menilai kebijakan pemerintah terkait penguatan demokrasi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Data dari dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi, dan studi kasus sebelumnya digunakan untuk mengidentifikasi praktik dan implementasi kebijakan yang berpotensi memperkuat hubungan positif antara demokrasi dan pembangunan ekonomi. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis isi dan analisis konten, yang memungkinkan peneliti mengekstrak dan mengkategorikan informasi penting serta mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari sumber-sumber tersebut. Pendekatan ini mendukung upaya membangun gambaran komprehensif dan kritis terhadap hubungan tersebut secara sistematis.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah mixed qualitative synthesis, yakni gabungan antara systematic literature review dan analisis dokumen kebijakan publik. Systematic literature review dilakukan dengan menyeleksi dan mensintesis temuan dari jurnal-jurnal ilmiah internasional maupun nasional yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024, terutama yang membahas keterkaitan antara demokrasi dan ekonomi di negara berkembang. Sementara itu, analisis dokumen kebijakan dilakukan terhadap berbagai dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), peraturan daerah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dan publikasi Kementerian Koperasi serta Kementerian Keuangan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diterjemahkan dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

Semua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen dan publikasi yang dapat diakses secara bebas, sehingga seluruh prosedur penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain. Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia ataupun hewan serta tidak menggunakan dataset tertutup, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik maupun nomor akses data khusus.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, artikel berita, serta studi kasus sebelumnya yang relevan dengan topik demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sumber-sumber tersebut dipilih karena dianggap kredibel dan mampu memberikan analisis teoretis maupun empiris yang komprehensif. Beberapa referensi penting seperti (Aloui & Saghrouni, 2024) dan Lipset (1959), memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menjelaskan keterkaitan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai konteks, termasuk Indonesia. Selain itu, laporan resmi pemerintah seperti BPS dan Kementerian Keuangan digunakan untuk memberikan konteks empiris yang memperkaya analisis literatur. Keberagaman sumber ini memungkinkan penelitian menghasilkan sintesis yang berimbang antara teori, data faktual, dan kebijakan publik.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara bertahap dengan mengikuti prinsip-prinsip sistematis. Tahap pertama adalah merancang strategi pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti demokrasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan publik, dan Indonesia untuk memperoleh literatur yang relevan. Hasil pencarian kemudian disaring melalui proses screening berdasarkan judul, abstrak, dan isi artikel. Sumber yang tidak memenuhi kriteria inklusi misalnya artikel opini tanpa metodologi yang jelas dikeluarkan dari analisis. Tahap berikutnya adalah pengumpulan dokumen kebijakan yang relevan dari situs resmi pemerintah dan lembaga publik. Semua dokumen tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaian antara prinsip demokrasi dan kebijakan ekonomi di Indonesia. Proses ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat konseptual dan empiris secara berimbang.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk menelaah substansi dari berbagai literatur akademik dan dokumen kebijakan dengan menyoroti konsep, kata kunci, dan hubungan antar variabel. Kemudian, analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari data, seperti tema akuntabilitas pemerintahan, partisipasi publik, transparansi fiskal, serta dukungan terhadap UMKM sebagai indikator pertumbuhan inklusif (Agustin et al., 2023). Dari hasil temuan tersebut, dilakukan pengelompokan dan penyusunan narasi analitis untuk menjelaskan mekanisme bagaimana demokrasi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menjamin keabsahan hasil, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber data dengan cara membandingkan hasil kajian literatur dengan temuan dari dokumen kebijakan publik. Teknik triangulasi ini membantu menilai sejauh mana teori yang dibahas dalam literatur akademik tercermin dalam praktik kebijakan ekonomi Indonesia (Hikmah, 2021). Selain itu, dilakukan pencatatan sistematis terhadap seluruh tahapan penelitian melalui audit trail untuk menjaga transparansi dan reliabilitas proses analisis. Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dan konseptual yang kuat dalam memahami peran demokrasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat datanya yang seluruhnya sekunder, sehingga tidak mencakup hasil wawancara atau observasi lapangan secara langsung. Namun, kekurangan ini diantisipasi melalui pemilihan sumber yang kredibel, beragam, dan mutakhir. Dengan menggabungkan literatur akademik dan dokumen kebijakan resmi, penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang komprehensif serta memberikan dasar ilmiah bagi penguatan institusi demokratis yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia (Aloui & Saghrouni, 2024; Mryn & Furqon I., 2024).

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis literatur dan dokumen kebijakan menunjukkan bahwa demokrasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demokrasi yang dijalankan secara substantif melalui partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintahan, dan transparansi kebijakan publik berkontribusi pada peningkatan efisiensi tata kelola ekonomi. Berdasarkan temuan berbagai literatur, demokrasi memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi karena proses pengambilan keputusan yang terbuka mampu menciptakan rasa kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Aloui & Saghrouni, 2024; Marijan, 2019). Hasil analisis juga menegaskan bahwa implementasi demokrasi yang baik meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan menciptakan lingkungan investasi yang stabil. Fenomena tersebut dapat diamati di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, di mana praktik demokrasi lokal yang inklusif berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pro-rakyat dan pengelolaan sumber daya yang transparan (Damanik & Lubis, 2022; Masâ, R. et al., 2022). Hal ini konsisten dengan hasil penelitian (Utomo & Soetjipto, 2021) yang menegaskan bahwa demokrasi daerah yang berkualitas mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan tata kelola publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa kualitas demokrasi menjadi faktor kunci dalam menentukan arah dan intensitas dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Demokrasi yang hanya bersifat prosedural tanpa disertai integritas kelembagaan justru dapat menimbulkan inefisiensi, seperti korupsi dan ketidakpastian kebijakan (Putri & Triani, 2021). Sebaliknya, demokrasi yang substantif mendorong efektivitas kebijakan publik dan penegakan hukum yang lebih kuat, sehingga memacu kepercayaan investor serta memperkuat stabilitas fiskal. Demokrasi juga berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat melalui kebebasan berekspresi, pendidikan politik, dan partisipasi ekonomi (Hikmah, 2021). Secara empiris, penelitian terdahulu mendukung temuan ini. Iskandar & Subekan menemukan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia berdampak positif terhadap investasi dan produktivitas regional. Sementara itu, penelitian Mryn & Furqon menegaskan bahwa demokrasi yang dijalankan dengan tata kelola yang baik berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kebaruan dari hasil penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara systematic literature review dan analisis dokumen kebijakan publik. Pendekatan ini memungkinkan verifikasi empiris dari teori-teori yang selama ini hanya dibahas secara konseptual. Sebagian besar studi sebelumnya menilai hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif lintas-negara, sedangkan penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menempatkan kebijakan ekonomi Indonesia sebagai konteks utama analisis. Dengan menelaah dokumen seperti RPJMN dan laporan pembangunan daerah, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas demokrasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan nilai-nilai demokrasi ke dalam kebijakan publik yang inklusif dan berpihak pada masyarakat menengah ke bawah (Agustin et al., 2023). Inilah aspek kebaruan

yang menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya berdampak pada legitimasi politik, tetapi juga merupakan fondasi kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Razif & Pratomo, 2023) yang menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah dan kualitas demokrasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transparansi fiskal dan efektivitas penggunaan anggaran. Penelitian terbaru oleh (Anjani & Adhestama, 2025) turut menegaskan bahwa konsistensi penerapan nilai-nilai demokrasi baik melalui partisipasi publik, pengawasan, maupun kebebasan sipil memberikan kontribusi langsung terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan penelitian lain, hasil kajian ini menunjukkan kesesuaian dengan pandangan Lipset yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dapat memperkuat demokrasi karena meningkatnya kesejahteraan masyarakat menciptakan stabilitas politik. Namun, temuan penelitian ini juga mendukung teori sebaliknya bahwa demokrasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ketika dijalankan dengan tata kelola yang efektif. Hasil ini memperluas pandangan Lipset dengan menekankan hubungan dua arah antara demokrasi dan pembangunan ekonomi, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Aloui & Saghrouni, 2024) yang menekankan pentingnya *institutional quality* sebagai variabel perantara dalam hubungan tersebut. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal terutama partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah merupakan salah satu faktor pembeda utama yang jarang dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

Dari perspektif teoretis, hasil penelitian ini memiliki signifikansi yang kuat terhadap pengembangan konsep *democratic governance* dalam studi ekonomi politik. Temuan ini mendukung teori yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kualitas lembaga demokratis dan tata kelola pemerintahan (Moatabar, 2021; Yangailo, 2024). Dalam konteks Indonesia, demokrasi berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat, sekaligus menjadi sarana untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat teori-teori sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual baru bahwa demokrasi yang efektif mampu menjadi katalis bagi reformasi kebijakan ekonomi, peningkatan investasi, dan penguatan sektor usaha kecil menengah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis literatur dan dokumen kebijakan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demokrasi yang sehat menyediakan kerangka tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan, mendorong inovasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan secara konsisten dapat

menciptakan stabilitas politik dan iklim investasi yang kondusif, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Implementasi kebijakan demokratis di berbagai daerah, seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, terbukti mampu mempercepat pembangunan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik memperkuat legitimasi kebijakan dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Namun demikian, keberhasilan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, praktik korupsi, serta inefisiensi birokrasi yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan demokrasi di bidang ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi agar manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh daerah.

Pemerintah perlu memperkuat kapasitas lembaga demokratis melalui peningkatan transparansi fiskal, partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran agar kebijakan ekonomi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed-method untuk menguji hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi secara empiris serta menelaah dinamika demokrasi lokal di berbagai daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agustin, L. A., Hesti, N. D., Suryaningsih, R. A., & Malik, A. (2023). PERAN DEMOKRASI DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI UMKM DI INDONESIA. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 01(02), 170–176.
- Aloui, A., & Saghrouni, O. (2024). Economic Growth and Democratic Political System in Developing Countries. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 2161–2168. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4365>
- Anjani, P., & Adhestama, B. (2025). ANALISIS PERAN DEMOKRASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(12), 1521–1530.
- Ansori, M. H., Putra, R. P. A., Efendi, J., Peranto, S., Sukandar, R., Rasyid, I., Cholid, S., Karib, F., & Hutagalung, V. (2015). *Demokrasi Pasca-Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku*.
- Damanik, D., & Lubis, I. (2022). Analisis Pengaruh Demokrasi, Jumlah Penduduk, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Sumatera. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1(April), 503–515. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.80>
- Densumite, S. (2022). The Relationship between Democracy and Economic Growth: An Empirical Analysis. *Asia Social Issues*, 16(1), e254430. <https://doi.org/https://doi.org/10.48048/asi.2023.254430>
- Hikmah, N. (2021). Hubungan Antara Demokrasi Dengan Pembangunan Ekonomi. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 1–12.

- Iskandar, A., & Subekan A. (2020). Democracy and Growth Nexus in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 20(2), 208–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/JEP.V20I2.7581>
- Jane, H. V., & Ojaghlo, M. (2025). Empirical linkages between democracy and economic growth: The case of Türkiye. *Economics & Sociology*, 18(2), 56–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.14254/2071-789x.2025/18-2/4>
- Kurniawan, B. (2022). Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Demokrasi dan Demokratisasi. *Journal Indonesian Democracy*.
- Marijan, K. (2019). Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru. *Kencana*.
- Masâ, R., Wijaya, A., & Suharto, R. B. (2022). Pengaruh demokrasi ekonomi dan derajat penghisapan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di daerah penghasil sumber daya alam dan daerah non sumber daya alam di Indonesia. *In Forum Ekonomi*, 20(1), 111–123.
- Moatabar, F. (2021). The role of democracy in economic growth : a (brief) literature review Abstract : This article presents a brief review of recent work by economists studying the effects of the political regime matters for economic growth and development . *African Scientific Journal*, 03(7), 194–205.
- Mose, N. (2025). Corruption, democracy, and economic growth in Kenya. *Asian Journal of Economics and Empirical Research*, 12(1), 74–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.20448/ajeer.v12i1.6920>
- Mryn, M., & Furqon I. (2024). Pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. <https://doi.org/https://doi.org/10.54199/pjeb.v4i2.359>
- Purba, S. F., & Hariyadi, H. (2023). Relasi Bauran Aspek Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 165–188. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.165-188>
- Putri, L. M., & Triani, M. (2021). ANALISIS HUBUNGAN KORUPSI,DEMOKRASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3, 17–24.
- Razif, M., & Pratomo, W. A. (2023). Analisis Pengaruh Tata Kelola Keuangan Daerah dan Demokrasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *In Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 6(1), 281–285.
- Simanjuntak, T. H., Mukhlis, I., & Pratama, A. (2021). Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus Globalisasi-Revolusi Industri 4.0. *In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 91–108.
- Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. *MOZAIK: Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8((1)). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>
- Syawie, M. (2011). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Sosio Informa*, 16(2).
- Utomo, J. K., & Soetjipto, W. (2021). Pengaruh Demokrasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 25(2), 200–216.

-
- Wibowo, M. G. (2020). Pengaruh Aspek-Aspek Demokrasi Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(2), 119–130.
- Widuri, D. R. (2021). Hubungan Antara Demokrasi Dan Kesejahteraan Warga Di Eropa: Analisis European Social Survey 2002-2018. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 306–318.
- Yangailo, T. (2024). Economic Growth Nexus: A Systematic Literature Review. *The Democracy*, 3(02), 97–109.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2024.003.02.1>